

URGENSI PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

(Urgency of Rural Development for Reaching National Food Security)

Sunarru Samsi Hariadi

ABSTRACT

Rural development is very important for reaching national food security. The goal of rural development is not only for increasing agricultural productivity, but also multysectoral development. Multi-sectoral development which is synergic among subsectors will increase people's income, increase home industry sector in rural areas, will support agriculture and absorption agricultural laborers, also increase people's welfare, so it will reach food security. Food security is not only enough food for every household, but also institutionalized custom of household consumption so that people do not have to eat rice as main food everyday, but they can consume other kinds of food as main food, for instance cassava, corn, sago, etc, that can be locally provided (not imported).

Key words: rural development, food security

PENDAHULUAN

Kata “urgensi” berarti keharusan yang mendesak, atau hal yang sangat penting, dan pedesaan, berarti daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu (Departemen P dan K, 1989). Dengan demikian, urgensi pembangunan pedesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, bermakna pentingnya atau keharusan mendesak dilakukan pembangunan pedesaan yang merupakan kehidupan agraris. Untuk analisis pembangunan pedesaan dalam rangka ketahanan pangan nasional, akan kita telaah perbandingan pembangunan pedesaan di Indonesia (Jawa) dan Jepang, etos kerja masyarakat, urgensi pembangunan pedesaan, teori-teori pembangunan pedesaan, dan strategi mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Perbandingan Pembangunan Pedesaan Jawa vs Jepang

Untuk memahami perkembangan pembangunan pedesaan yang telah berjalan dewasa ini, tidak ada jeleknya membandingkan pola perkembangan pembangunan pedesaan yang terjadi di Jepang dan Indonesia (terutama Jawa). Geertz (1983) dalam bukunya “Involusi Pertanian” menggambarkan kondisi pedesaan Jawa dan Jepang pada tahun 1830-an.

Pada tahun 1830-an masyarakat pedesaan Jawa dan Jepang relatif tidak berbeda, suatu kondisi agraris yang nyaris sama. Namun kemudian, terjadi pola perkembangan masyarakat pedesaan yang berbeda diantara kedua kawasan tersebut. Meskipun membanding Jawa dan Jepang tidak terlalu tepat, karena Jawa ketika itu dalam kondisi dijajah Belanda, sedangkan Jepang dikuasai Dinasti Tokugawa, namun kita bisa belajar mengenai pola

perkembangan masyarakat pedesaan. Perbandingan antara pedesaan Jawa dan Jepang sekitar tahun 1830 an sampai dengan

akhir Perang Dunia I, serta perkembangannya digambarkan oleh Geertz seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Perkembangan Pedesaan Jawa dan Jepang antara Tahun 1830-an sampai dengan Akhir Perang Dunia I.

Unsur	Jawa	Jepang
Teknik	Perbaikan yang lambat, padat karya	Pertumbuhan yang pesat, meluasnya lapangan kerja sektor manufaktur
Lapangan Kerja	Tidak ada perluasan lapangan kerja di luar sektor pertanian, penyempurnaan teknik produksi yang menyerap tenaga kerja	Perluasan yang pesat di sektor industri yang menyerap seluruh pertambahan penduduk. Lapangan kerja pertanian konstan.
Urbanisasi	Terhambat, kota besar dan kecil tumbuh lebih lambat dibanding jumlah penduduk.	Urbanisasi pesat, kota besar dan kecil tumbuh lebih cepat daripada jumlah penduduk.
Pendapatan per- Kapita	Di sektor pertanian konstan, sektor perkebunan meningkat	Sektor pertanian meningkat pesat, kenaikannya untuk membiayai sektor industri.
Dualisme Ekonomi	Masukan modal meningkat tajam di sektor perkebunan (dana Belanda), di sektor petani tanaman pangan masukan tenaga kerja yang meningkat. Terjadi perpisahan kedua sektor tersebut sekaligus di bidang kebudayaan, sosial, teknologi, dan sedikit aktifitas industri madya. Terjadi Dualisme Ekonomi.	Kenaikan pendapatan sektor pertanian untuk membiayai sektor industri, antar sektor tersebut ada hubungan erat dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, dan berkembangnya aktifitas industri kecil.

Sumber: Geertz. 1983.

Dari tabel perkembangan pedesaan Jawa dan Jepang tahun 1830-an sampai dengan akhir perang Dunia I tersebut, tampak bahwa pertambahan penduduk di Jepang dapat ditampung di sektor industri, sementara itu di Jawa pertambahan penduduk tidak ditampung di sektor industri tetapi tetap di sektor pertanian, dengan demikian pertanian menjadi kelebihan tenaga kerja. Lahan pertanian di Jepang dapat bertahan dengan luas areal yang mencukupi untuk setiap keluarga tani, karena yang

memiliki hak waris tanah pertanian hanyalah anak laki-laki tertua, anak-anak yang lain keluar desa dan bekerja di sektor industri. Di Jawa, luas pemilikan lahan pertanian keluarga semakin lama semakin mengecil, karena dalam proses pewarisan tanah dibagi-bagikan kepada semua anak petani, dan semua anak petani tetap bekerja di sektor pertanian karena sektor industri tidak berkembang dan tidak mampu menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, kehidupan keluarga petani di Jawa makin lama semakin

tidak mampu hanya mengandalkan hidup dari sektor pertanian saja, karena lahan pertanian yang sempit. Dari kondisi pedesaan yang relatif sama pada tahun 1830-an antara Jepang dan Jawa, dan waktu berjalan 178 tahun kemudian, saat ini tahun 2008/2009, Jepang telah menjadi negara industri yang berperan dalam perekonomian dunia, dan kondisi Jawa masih belum sepenuhnya menuju industrialisasi. Perkembangan pedesaan dan terutama industri di Jepang yang bisa kita lihat dewasa ini, merupakan proses sejarah dan tentu tidak terlepas dari etos kerja dan mentalitas sumberdaya manusianya.

Etos Kerja

Menurut para ahli, diantaranya Okhawa dan Rosovsky dalam bukunya “*Japanese Economic Growth: Trend Acceleration in the Twentieth Century*” (dalam Koentjaraningrat, 1984), pada waktu para pemimpin Meiji mulai dengan pembangunan ekonomi tahun 1864, rakyat Jepang secara mental sudah siap untuk membangun, sedangkan Indonesia baru mulai membangun 100 tahun kemudian (yakni tahun 1969 melalui Pelita). Pada waktu itu rakyat Jepang sudah banyak yang melek huruf. Dengan adat lama dan agama serta kepercayaan terhadap tokoh kaisar keturunan dewa yang keramat mempertebal motivasi untuk berbakti, loyalitas terhadap negara dan disiplin, dilain pihak para pemimpin Meiji berhasil menimbulkan suasana membangun yang penuh semangat, terlebih bangsa Jepang waktu itu sudah terbiasa hidup

sederhana dan hemat. Sementara itu, hukum adat waris yang bersifat *patrilineal-primogenitur* sangat mendukung pembangunan pertanian, dalam hukum ini seluruh harta pusaka tanah, rumah, dan pekarangan serta perabot rumah diwariskan kepada anak laki-laki yang tertua. Sehingga tanah pertanian tidak terpecah-pecah, usaha tani berkembang dengan luas lahan yang mencukupi. Sementara itu, anak-anak lain yang tidak mendapat waris tanah pergi meninggalkan desa dan bekerja di sektor industri yang sedang berkembang.

Sementara itu, perkembangan pedesaan dan terutama industri di Indonesia belum dapat dikatakan maju. Setelah melewati zaman revolusi, ada beberapa kelemahan mentalitas masyarakat Indonesia dalam hal membangun. Koentjaraningrat (1984) mencatat ada 5 kelemahan mentalitas kita terutama setelah zaman revolusi, *Pertama*; mentalitas yang meremehkan mutu, yakni kurang menghargai mutu hasil kerja, cepat puas dengan hasil kerja yang ada. *Kedua*; mentalitas yang suka menerabas, bernafsu mencapai tujuan secepat-cepatnya tanpa melalui proses tahap demi tahap. *Ketiga*; sifat kurang percaya pada diri sendiri, mungkin karena lama terjajah sehingga lebih percaya pada orang lain/asing. *Keempat*; sifat tidak disiplin murni, artinya bahwa, seringkali disiplin dilakukan karena takut ada pengawasan dari atasan, ketika pengawasan tidak ada hilanglah hasrat untuk mentaati aturan yang ada. *Kelima*; mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab, terutama dalam perjanjian-perjanjian yang bersifat ekonomis.

Dengan melakukan evaluasi diri, terutama memperhatikan kelemahan-kelemahan kita yang harus dieliminasi, maka dapat menjadi modal ketika membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pedesaan, yang merupakan kawasan agraris dengan lahan yang subur, sungguh menyedihkan ketika kita masih mengimpor komoditas pertanian. Karena itulah, urgensinya pembangunan pedesaan.

Urgensi Pembangunan Pedesaan Untuk Ketahanan Pangan Nasional

Menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia adalah fisiologis yang didalamnya termasuk pangan, dengan demikian pangan harus terpenuhi didalam kehidupan manusia, pangan merupakan komponen dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. UU No.12 Tahun 1996 tentang pangan, bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik

yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Jaminan terhadap pemenuhan hak tersebut secara eksplisit ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2005 tentang Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dimana setiap orang berhak atas standar hidup yang layak baginya dan keluarganya atas pangan serta bebas dari kelaparan (Alimoeso, 2008).

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan ketahanan pangan kita ?, sejauhmana pangan sudah dapat dipenuhi dari dalam negeri ?. Kita coba memperhatikan proyeksi produksi tanaman pangan Indonesia, yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Proyeksi Produksi Tanaman Pangan (Juta Ton) di Indonesia Tahun 2007 - 2009.

Jenis Tanaman	Tahun dan Laju Peningkatan (%)					
	Produksi 2007	Laju (%)	Produksi 2008	Laju (%)	Produksi 2009	Laju (%)
1.Padi	56,39	1,20	57,05	1,18	57,70	1,15
2.Jagung	12,84	4,31	13,38	4,22	13,96	4,33
3.Kedelai	0,88	6,50	0,939	6,50	1,00	6,50
4.Kc tanah	0,84	0,41	0,84	0,65	0,85	0,71
5.Ubi kayu	19,74	0,47	19,81	0,35	19,81	0,42
6.Ubi jalar	1,89	0,35	1,90	0,40	1,91	0,45

Sumber : Biro Perencanaan Deptan RI (2005) *dalam* Alimoeso, 2008.

Keterangan : Laju peningkatan produksi berdasar tahun sebelumnya.

Dari Tabel 2 tampak, bahwa dari tahun ke tahun ada laju pertumbuhan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, baik padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, maupun

ubi jalar. Namun demikian, perlu kita memperhatikan, seberapa besar kebutuhan konsumsi pangan kita. Tabel 3 menggambarkan proyeksi kebutuhan beras Indonesia.

Tabel 3. Proyeksi Produksi, Impor dan Konsumsi Beras di Indonesia.

Tahun	Produksi (Ton)	Impor (Ton)	Konsumsi (Ton)	Selisih Produksi-Konsumsi (Ton)
2010	44.217.300	16.530,10	49.371.096,70	- 5.153.796,7
2015	34.348.280	24.727,53	54.827.597,20	- 20.479.3172
2020	18.573.760	35.215,10	63.970.027,70	- 45.396.267,7

Sumber: FAO 2007 dalam Mulyo *et al*,2008.

Berdasar proyeksi FAO (Tabel 3), tampaknya sampai dengan tahun 2020 Indonesia masih mengimpor beras, hal ini tampak dengan meningkatnya konsumsi beras akibat pertambahan jumlah penduduk, sementara itu produksi beras justru mengalami penurunan dari tahun ketahun. Hal ini juga disebabkan karena penurunan areal persawahan yang berubah menjadi kawasan pemukiman atau non pertanian. Perubahan fungsi lahan sawah menjadi non pertanian tahun 1999-2001 di Jawa seluas 167.150 Ha (5,01 %), untuk Indonesia perubahan fungsi tersebut berkisar 3,34 % s/d 15,86 % (Hariadi, 2004). Namun demikian,

apakah produksi beras yang tidak mencukupi itu hanya disebabkan penurunan areal lahan pertanian. Kita ingat, ketika tahun 1970-an pemerintah getol membangun pertanian, mengintensifkan penyuluhan, mengembangkan kelembagaan petani, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, hasilnya luar biasa, tahun 1984 Indonesia swasembada beras dan bahkan mampu membantu mengirim beras ke Afrika.

Untuk bahan pangan yang lain, seperti jagung, tampak juga masih perlu mengimpor. Tabel 4 memberikan gambaran proyeksi produksi dan impor jagung Indonesia.

Tabel 4. Proyeksi Produksi, Impor dan Konsumsi Jagung di Indonesia.

Tahun	Produksi (Ton)	Impor (Ton)	Konsumsi untuk pangan (Ton)	Selisih (Ton)
2010	12.646.900,00	2.144.932,00	11.831.101,40	815.798,60
2015	14.089.347,50	2.991.273,13	23.788.092,40	- 9.698.744,90
2030	16.809.740,00	6.752.768,00	126.747.525,40	- 109.937.785,40

Sumber: Mulyo *et al*,2008.

Sampai dengan tahun 2010 konsumsi jagung masih bisa dicukupi dari produksi dalam negeri, namun demikian pada tahun-tahun

berikutnya 2015 dan 2030 konsumsi tampak meningkat dan menyebabkan kekurangan meskipun dengan impor

Tabel 5. Proyeksi Produksi dan Konsumsi Kedelai Indonesia (1000 Ton).

Tahun	Produksi	Konsumsi	Surplus/ Defisit
2010	837,19	1.882,72	- 1,045,53
2015	964,40	2.069,28	- 1.104,88
2030	1.474,21	2.747,26	- 1,273,15

Sumber: Primasari *et al*,2008.

Untuk bahan pangan kedelai, konsumsi juga melebihi produksi sehingga untuk mencukupinya masih memerlukan impor.

Berdasarkan gambaran beberapa bahan pangan tersebut, produksi dalam negeri ternyata belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan demikian masih diperlukan impor. Hal ini memberikan gambaran bahwa ketahanan pangan nasional masih lemah, dan disinilah urgensinya pembangunan pedesaan untuk membangun ketahanan pangan nasional, sebab membangun ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya meningkatkan produksi pertanian saja, tetapi harus dilakukan melalui multisektoral pembangunan pedesaan. Pengalaman pembangunan pedesaan skala global menunjukkan, bahwa 81 % pengentasan kemiskinan pedesaan global selama kurun waktu 1993 - 2002 adalah hasil dari membaiknya kondisi wilayah pedesaan (Anonim. 2008).

Model Pembangunan Pedesaan

Weaver dalam bukunya; *“Growth and Equity: Can They be Happy Together”* membahas model-model pembangunan yang berusaha mengatasi masalah pembangunan dan pemerataan terutama di pedesaan (Susanto, 1984), pendekatan tersebut yakni:

a. Sistem *Employment Generation*

Pendekatan ini mengutamakan penciptaan kesempatan kerja, utamanya bagi golongan ekonomi lemah tetapi memiliki kemampuan di daerah pedesaan.

b. Teory Chenery

Fokus perhatian adalah investasi secara

langsung dan tak langsung untuk masyarakat dalam hal pendidikan, fasilitas kesehatan, kredit dan lain-lain. Dengan kata lain, perbaikan pra produksi akan meningkatkan kemampuan berproduksi oleh golongan ekonomi lemah.

c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dikemukakan oleh Bank Dunia bersama James Grant, pendekatan ini menitik beratkan pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan dan lain lain, tujuan utamanya memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, sandang, pelayanan kesehatan, dan partisipasi pengambilan keputusan. Utamanya pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kemampuan fisik dan non fisik, dan perkembangannya diarahkan ke proses industrialisasi.

d. Pendekatan John Mellor

Pendekatan pemerataan dari segi pemilikan tanah terutama di daerah pedesaan. Utamanya peningkatan produksi pertanian dengan harga yang stabil agar terjadi peningkatan pendapatan petani, selanjutnya di desa dikembangkan industri ringan yang berpotensi di daerahnya, sehingga secara mental masyarakat dibina untuk mengembangkan wilayahnya dan teratasi kesenjangan antara desa dan kota.

Dari keempat pendekatan tersebut, beberapa kata kunci pembangunan pedesaan antara lain meliputi: peningkatan produksi pertanian, perluasan kesempatan kerja di pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana (pendidikan, kesehatan, perkreditan, dan lain lain), peningkatan kualitas sumber daya manusia, proses industrialisasi, penataan

pemilikan tanah, kepastian harga hasil pertanian. Dengan demikian, pembangunan pedesaan merupakan pembangunan multisektoral yang harus dilakukan secara terpadu, terlebih dari itu, tidak hanya membangun ketahanan pangan saja, tetapi juga mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan yang melembaga.

Ketahanan Pangan Nasional: Melembagakan Ketahanan Pangan

Kelembagaan (masyarakat) merupakan terjemahan dari “*social institution*”, menurut Stewart (1978) kelembagaan adalah bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian-pengertian abstrak perihal adanya norma-norma atau peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Gillin and Gillin (*cit* Soekanto. 2000) memberi pengertian, bahwa kelembagaan masyarakat merupakan suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan perikelakuan yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan, terdiri atas norma serta unsur budaya lain yang tergabung dalam satu unit yang fungsional. Sementara itu, Koentjaraningrat (1984) berpendapat bahwa “*social institution*” sebagai pranata sosial, yakni suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut terutama menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Norma-norma berproses, ditinjau dari kekuatan mengikat dari yang paling lemah mengikatnya

sampai dengan yang paling kuat mengikatnya, norma-norma dibedakan: cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), adat istiadat (*custom*).

Berbicara ketahanan pangan (*food security*), menurut PP No.68 Tahun 2002, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sedangkan untuk suatu wilayah (desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya), suatu wilayah memiliki ketahanan pangan yang baik jika: 1). Pangan tersedia cukup, 2). Harga pangan stabil terjangkau, dan 3). Ketersediaan secara cukup dan harga yang terjangkau dalam dimensi waktu.

Dengan demikian ketika berbicara “pengembangan kelembagaan untuk ketahanan pangan”, berarti berbicara kelembagaan yang dapat dibahas dari dua segi, *pertama*; kelembagaan sebagai suatu pranata atau norma-norma (Koentjaraningrat), dan *kedua*; kelembagaan sebagai suatu badan atau organisasi yang didalamnya terdapat norma-norma (Gillin and Gillin). Tingkatan ketahanan pangan dapat dibahas mulai dari *level* terendah yakni rumah tangga, sampai *level* yang tertinggi suatu wilayah (yakni negara). Dalam mengembangkan kelembagaan ketahanan pangan nasional tentu tidak mudah, ada tantangan, namun bisa dicari adanya peluang-peluang.

Tantangan dan Peluang dalam Melembagakan Ketahanan Pangan

Tantangan dalam pengembangan kelembagaan ketahanan pangan dapat dibahas dari segi pranata sosialnya (cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat) dan lembaga sebagai suatu organisasi, dapat dirunut dari bawah yakni *level* rumah tangga, yang kemudian meningkat ke wilayah tertentu misalnya desa/kelurahan. Tantangan dan masalah dalam melembagakan ketahanan pangan nasional antara lain (a). Rumah tangga pada umumnya sudah terbiasa makan nasi untuk memenuhi kebutuhan pangan, padahal: jagung, sagu, ketela, dan sebagainya juga merupakan bahan pangan, (b). R u m a h tangga yang dahulu terbiasa makan jagung, sagu, ketela untuk memenuhi kebutuhan pangan sekarang kebanyakan sudah tidak lagi mengkonsumsi bahan pangan tersebut, (c). Pangan selain beras (jagung, sagu, ketela, ubi, dan sebagainya) kurang dipromosikan sebagai bahan pangan yang bergizi, sehingga kebiasaan makan nasi merupakan suatu hal yang sudah melembaga atau menjadi adat kebiasaan yang sulit dirubah, (d). M a s y a r a k a t terbiasa mengkonsumsi bahan makanan yang terbuat dari gandum, akibatnya impor gandum meningkat terus. Tahun 2000 - 2005 impor gandum meningkat hampir 10 % menjadi 6.589 juta ton, dan pada tahun 2025 diproyeksikan impor gandum meningkat tiga kali lipat menjadi 18.679 juta ton (Kompas 1 Sept 2008). (e). Pada *level* wilayah (desa, kecamatan, dan seterusnya) tidak mempedulikan kecukupan pangan, dahulu pernah ada “lumbung pangan”

atau “lumbung desa” yang ada di *level* desa namun sekarang sudah menghilang.

Peluang mengembangkan kelembagaan dalam rangka ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih ada, mengingat kebiasaan (*folkways*) masyarakat yang memiliki pola makan beraneka bahan pangan. Disamping itu, secara organisatoris, kelompok-kelompok tani yang ada di *level* dusun ataupun desa masih eksis meskipun banyak yang aktivitasnya melemah, kelompok-kelompok tani ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah “organisasi” lumbung pangan desa manakala memperoleh bimbingan yang intensif. Dengan demikian, melembagakan ketahanan pangan nasional memerlukan suatu strategi.

Strategi Pengembangan Kelembagaan

Strategi dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dapat dilakukan melalui dua arus: yang *pertama* adalah pengembangan norma-norma (kebiasaan dan tata kelakuan) masyarakat, dan yang *kedua* adalah pengembangan organisasi beserta normatifnya.

Pengembangan norma-norma (kebiasaan dan tata kelakuan) masyarakat: (a). Pengembangan norma (cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat), dapat ditempuh melalui kampanye atau penyuluhan secara nasional. Agar kebiasaan mengkonsumsi makan nasi oleh rumah tangga dapat dirubah tidak hanya makan nasi. Tetapi bisa dikombinasi atau diganti

dengan bahan pangan lain yang potensial diproduksi (jagung, sagu, ketela, dan ubi, sebagainya), sehingga tidak perlu harus impor beras. (b) Pemerintah dan para Penyuluh turut mengkampanyekan aneka ragam jenis makanan lokal yang potensial diproduksi dalam negeri sebagai makanan khas Indonesia yang bergizi kepada masyarakat. Dengan demikian, agar terjadi pelebagaan yakni menjadi kebiasaan dan tata kelakuan setiap rumah tangga dan masyarakat, bahwa makan tidak harus nasi, makanan tidak harus berasal dari bahan gandum yang harus diimpor. Penelitian di pedesaan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 1998-an menunjukkan, ketika itu terjadi krisis ekonomi dan masyarakat umumnya sulit pangan dengan harga-harga yang membumbung tinggi, namun masyarakat desa justru tidak merasa kesulitan memenuhi kebutuhan pangan karena sudah terbiasa makan dari bahan “gaplek” yang terbuat dari bahan dasar ketela yang potensial diproduksi lokal, bahkan bahan pangan ini sekarang sudah dibuat beragam jenis makanan, ada “thiwul instant”, “gathot”, roti, dan sebagainya. (c). Bahan pangan lokal seperti sagu, jagung, ketela, dan sebagainya, yang dahulu menjadi makanan pokok masyarakat lokal tertentu perlu ditingkatkan produksinya, seraya promosi nasional mengkonsumsi bahan pangan tersebut. Hal ini perlu didukung penyuluhan pertanian guna pengembangan tanaman lokal yang potensial, serta diikuti dengan riset untuk peningkatan produktivitas komoditas tersebut. (d). Pengembangan makanan tradisional yang dapat dibuat dari

bahan dasar bukan gandum dan potensial diproduksi dalam negeri (misal jagung, ketela, sagu, dan sebagainya), seraya kampanye nasional untuk mengkonsumsinya sehingga mengurangi impor gandum yang cenderung terus meningkat.

Pengembangan organisasi beserta normatifnya:

a. Pada *level* dusun; organisasi kelompok kelompok masyarakat/petani yang sekarang sedang dikembangkan oleh Departemen Pertanian RI melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/ KPTS/ OT. 160/4/2007 tentang: Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, agar dibina secara intensif melalui pendekatan dialogis serta dimanfaatkan juga sebagai wadah kerjasama petani untuk membentuk “lumbung pangan desa”. Peningkatan kemampuan kelompok tani dimaksudkan agar kelompok dapat berfungsi sebagai tempat: unit belajar, unit kerjasama, unit produksi, dan unit bisnis.

1). Unit Belajar

Agar proses belajar mengajar pada kelompok tani dapat berlangsung dengan baik, melalui dialogis kelompok tani dibimbing agar mampu menggali dan merumuskan keperluan belajar, merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar, menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, untuk mengatasi problema pertanian.

2). Unit Kerjasama

Kelompok sebagai unit kerjasama, secara dialogis kelompok dibimbing agar mampu menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak terkait (penyedia saprodi, pengolahan, pemasaran hasil, dan permodalan), mengadakan pemupukan modal untuk pengembangan usaha kelompok dan kerjasama membentuk “lambung pangan”.

Penyuluh pertanian aktif dalam pembinaan kelompok tani melalui pembinaan yang dialogis untuk pengembangan kelompok sebagai wadah kerjasama “lambung pangan”. Model ini dapat meniru Kelompok Wanita Tani “Menur” di Desa Wareng Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, yang sampai dengan tahun 2008/2009 tetap aktif melestarikan lambung kelompok, ketika panen setiap anggota kelompok menyisihkan sebagian kecil hasil panennya untuk disetorkan ke kelompok sebagai tabungan untuk lambung kelompok, dan ini memberikan kontribusi ketahanan pangan lokal tingkat dusun.

3). Unit Produksi

Sebagai unit produksi, secara dialogis kelompok tani dibimbing agar memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam pengembangan produksi yang menguntungkan berdasar informasi yang tersedia (di bidang teknologi, sosial, permodalan, saprodi, sumberdaya alam lainnya).

4). Unit Bisnis

Agar kelompok mampu berfungsi dalam bisnis, kelompok secara dialogis dibimbing agar memiliki kemampuan melakukan perhitungan usaha tani yang menguntungkan, mampu memahami kebutuhan pasar, mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan bisnis (pemilik modal, bank, koperasi, pengusaha, penyalur, penjual, dan sebagainya), mengembangkan usaha tani dan usaha lain yang memberikan keuntungan.

- b. Pada *level* desa; gapoktan yang merupakan gabungan kelompok tani, secara intensif dibina melalui pendekatan dialogis sehingga terbentuk gapoktan yang mampu melakukan bisnis dalam skala lebih besar, dengan demikian mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial yang melekat pada kelompok tani harus dikembangkan dan dikuatkan, yakni penguatan dalam hal norma kelompok, jaringan kerja kelompok dan kepercayaan anggota kelompok, dengan dukungan pemimpin/kontak tani yang kuat.
 - c. Pada *level* kecamatan; Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat penyuluhan selalu mendorong pengembangan gapoktan di wilayah kerjanya, mengembangkan jejaring dengan lembaga lain agar senantiasa memperoleh inovasi dari luar.
 - d. Pada *level* kabupaten ke atas; perlu koordinasi yang baik diantara berbagai lembaga/kementerian yang terkait satu sama lain dalam pembangunan pedesaan.
-

PENUTUP

Dewasa ini, urgensi pembangunan pedesaan tampak nyata, terlebih manakala kita mencoba melihat perkembangan pedesaan Jawa dengan membanding Jepang yang 178 tahun lalu kurang lebih sama kondisinya. Dari sana kita bisa belajar, evaluasi diri, melihat kelemahan-kelemahan kita, yang kemudian dapat digunakan pembangunan pedesaan ke depan.

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan pedesaan, pembangunan haruslah melibatkan multisektoral secara terpadu. Pengalaman banyak negara menunjukkan mengembangkan sektor industri yang mendukung pertanian sangat bermanfaat mengurangi pengangguran, hasil pertanian dapat diserap sektor industri, dan industri dapat menampung tenaga kerja pedesaan yang melimpah. Sementara itu, kelemahan dalam mentalitas pembangunan masyarakat perlu diperbaiki. Ketahanan pangan dapat dimulai dari pembangunan pedesaan, yang dilanjutkan dengan upaya melembagakan ketahanan pangan. Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan secara nasional, tidak hanya melalui pengembangan organisasi dan lembaga yang terkait saja, tetapi juga pengembangan kelembagaan dalam arti melembagakan kebiasaan dan tata kelakuan masyarakat dalam pola makan yang tidak hanya bergantung beras atau gandum yang harus diimpor, tetapi juga pengembangan bahan pangan lokal yang potensial di banyak wilayah Indonesia.

Secara mendasar, perlu peninjauan kembali PP-RI No.38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten. PP tersebut pada pasal 7 ayat 4 yakni tentang Kewenangan Pemerintah daerah, menyebutkan; bahwa urusan “pertanian, kelautan dan perikanan” bukanlah urusan wajib pemerintah daerah, melainkan urusan pilihan, hal ini dapat menyebabkan pemerintah daerah tidak mengurus pertanian karena “dianggap” bukan potensi unggulan sehingga tidak wajib diurus, padahal pangan sangat berkaitan erat dengan pertanian dan perikanan. Oleh karena itu, PP ini harus dicermati dan bila perlu direvisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2006 tentang: Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- _____. 2008. *World Development Report*. The World Bank. Washington.
- Bandura. 1997. *Self Efficacy; The Exercise of Control*. WH Freeman and Company. New York.
- Departemen P dan K, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Departemen Pertanian RI. 2007. *Peraturan Menteri Pertanian No: 273/KPTS/OT. 160/4/2007 tentang: Pedoman pembinaan kelembagaan petani*. Jakarta.
- Geertz, 1983. *Involusi Pertanian; Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Bratara Karya Aksara. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Mulyo, JH & Y Setiawan, I Widhaningsih. 2008. *Mengkaji Prospek Kedaulatan Pangan Di Indonesia*. Dalam: Kastono, D (ed). 2008. *Kedaulatan Pangan untuk Kedaulatan Negara*. Fak Pertanian

- UGM. Yogyakarta.
- Primasari, R & S Hardyastuti, JH Mulyo. 2008. *Prospek dan Tantangan Komoditas Kedelai Menuju Kedaulatan Pangan di Indonesia*. Dalam: Kastono, D (ed). 2008. *Kedaulatan Pangan untuk Kedaulatan Negara*. Fak Pertanian UGM. Yogyakarta.
- Rogers, EM. 1995. *Diffusion of Innovations*. The Free Press. New York.
- Stewart, Elbert W. 1978. *Sociology The Human Science*. Mc Graw- Hill Book Company. New York.
- Susanto, A, 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Binacipta. Jakarta.
- Soekanto, S. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV. Rajawali. Jakarta.
-